

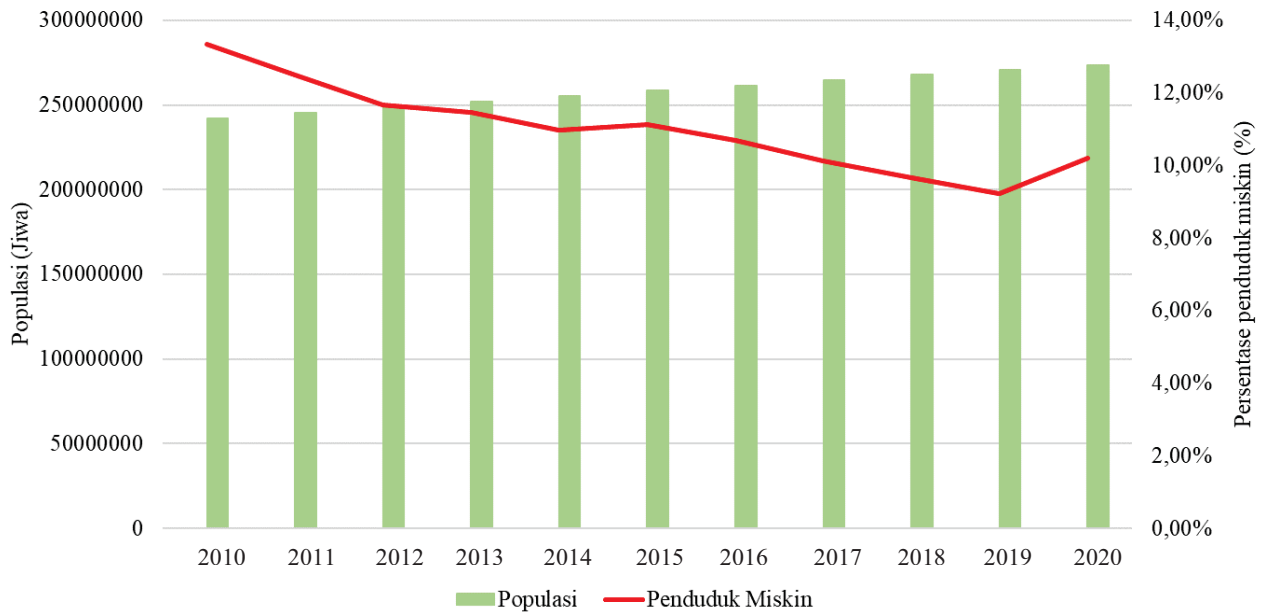
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebanyak 189 negara yang tergabung menjadi anggota PBB termasuk Indonesia telah mendeklarasikan terkait *millennium declaration* pada bulan September tahun 2000, deklarasi tersebut dikenal sebagai *Millenium Development Goals* (MDG's). Tujuan dari MDG's terdiri dari delapan capaian yang harus dipenuhi sampai tahun 2015 salah satunya yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Setelah itu, pada 25 September 2015 sebanyak 193 kepala negara termasuk Indonesia kembali mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDG's) tujuan utamanya adalah kemiskinan berakhir, kesenjangan berkurang dan lingkungan terlindungi. SDG's sendiri memiliki 169 target dan 17 tujuan yang harus dicapai hingga tahun 2030 dengan tujuan yang pertama adalah memberantas kemiskinan di Indonesia hingga tuntas.

Tujuan yang tercantum dalam MDG's maupun SDG's yaitu menanggulangi kemiskinan karena kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang masih menjadi urusan penting negara di seluruh dunia utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa atau setara dengan 10,19% dari populasi penduduk di Indonesia. Angka tersebut dirasa masih jauh dari batas minimal yang sudah ditetapkan oleh *Millennium Development Goals* (MDG's) yang seharusnya sebesar 7,5% dari populasi penduduk. Gambar 1.1 menunjukkan populasi penduduk dan juga persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010-2020.



Gambar 1. 1 Populasi (Jiwa) dan persentase penduduk miskin (Persen) di Indonesia tahun 2010-2020

Sumber : Badan Pusat Statistika (2020) dan *World Bank* (2020)

Penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, terhitung mulai tahun 2010 hingga tahun 2020 meningkat sebesar 13,10%, sedangkan rata-rata peningkatannya sendiri sebesar 1,23% artinya rata-rata peningkatan populasi di Indonesia sekitar 3 juta jiwa mulai tahun 2010 hingga tahun 2020. Keadaan tersebut juga bersamaan dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,14% atau rata-rata sekitar 700 ribu jiwa tiap tahunnya. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut pastinya tidak luput dari campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti mengadakan jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, program keluarga harapan, program bantuan untuk siswa yang kurang mampu dan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Cantillon (2011) mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan tersebut bersifat relatif, multidimensional dan memiliki arti yang berbeda-beda. *world bank* (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kurangnya kesejahteraan yang

dirasakan individu dengan indikator yang digunakan yakni angka gizi buruk, kesehatan ibu, rendahnya akses mengenai sanitasi dan air bersih serta akses dalam hal pendidikan. Menurut Samuelson & Nordhaus (2010) juga mengatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia akan menyebabkan individu terperangkap dalam lingkaran kemiskinan (*vicious cycle*). Sen (1981) juga berpendapat bahwa kemiskinan terjadi sebagai akibat dari *capability deprivation*. Kemiskinan terjadi ketika individu mengalami keterbelakangan dan minimnya terhadap akses untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, baik itu dalam dimensi kesehatan, kualitas hidup layak, pendidikan, akses terhadap ekonomi dan akses dalam berdemokrasi.

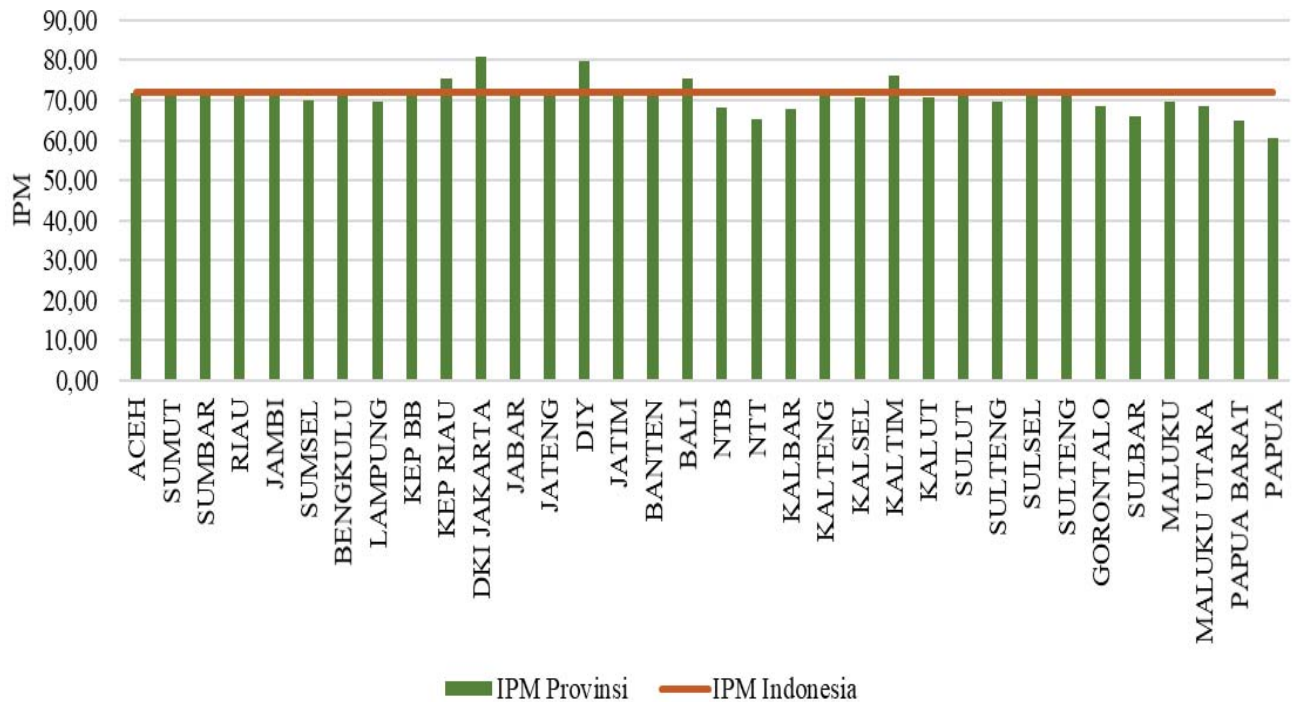
World bank (1990) telah mencanangkan bahwa dalam mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 elemen yaitu pertama dengan mempromosikan penggunaan aset yang efisien untuk orang miskin seperti kebijakan yang memanfaatkan insentif pasar, lembaga sosial dan politik, infrastruktur dan teknologi. Kedua adalah penyediaan layanan sosial dasar bagi masyarakat miskin (misalnya perawatan kesehatan dasar, keluarga berencana, gizi, dan pendidikan dasar). Terdapat empat langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menyikapi penduduk miskin serta membantu menanggulangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Empat langkah tersebut yakni pemusatan kebijakan sosial dan ekonomi, membuka peluang kerja, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta membuat kebijakan-kebijakan lain yang dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan jangka panjang tahun 2005-2025 yang tertuang dalam suatu program Rancangan Pembangunan Jangka Panjang, Bab IV sub bab Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas No.3 yang menyatakan bahwa “Perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan karena kedua hal tersebut merupakan investasi yang mampu berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi” (RPJPN, 2005). Selain program RPJP pemerintah juga memiliki strategi lain seperti yang tertuang

dalam isi dokumen Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa empat prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan adalah dengan melakukan perbaikan akses layanan dasar kepada masyarakat miskin, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan yang inklusif serta memperbaiki sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan dan miskin (SPPK, 2010).

Pihak pemerintah telah merencanakan suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada sebagai kunci dalam membantu menurunkan angka kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, diantaranya melalui pendidikan dan kesehatan. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (2021) IPM memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup layak. Sedangkan menurut publikasi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), konsep pembangunan manusia diartikan sebagai proses peningkatan semua aspek kehidupan masyarakat. Aspek penting dari kehidupan termasuk kesehatan dan umur panjang, memadainya tingkat pendidikan serta taraf hidup layak yang memadai. Berdasarkan data yang diambil dari *United Nations Development Programme* (UNDP) 2020, menunjukkan bahwa persentase IPM tertinggi berada di negara Singapura dengan nilai 0,93 sedangkan untuk Indonesia sendiri berada pada urutan keenam dengan nilai 0,71.

Penjelasan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang & Woyanti (2018) yang menyatakan bahwa dimensi kesehatan yang diilustrasikan oleh angka harapan hidup dan dimensi pendidikan yang diilustrasikan oleh rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa antara dua variabel yang ada mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, di Kota Jambi pada tahun 2004-2017 juga sama bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan sebesar 0,042% dan variabel angka harapan hidup berpengaruh signifikan sebesar 0,01 dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Putriani et al., 2018).



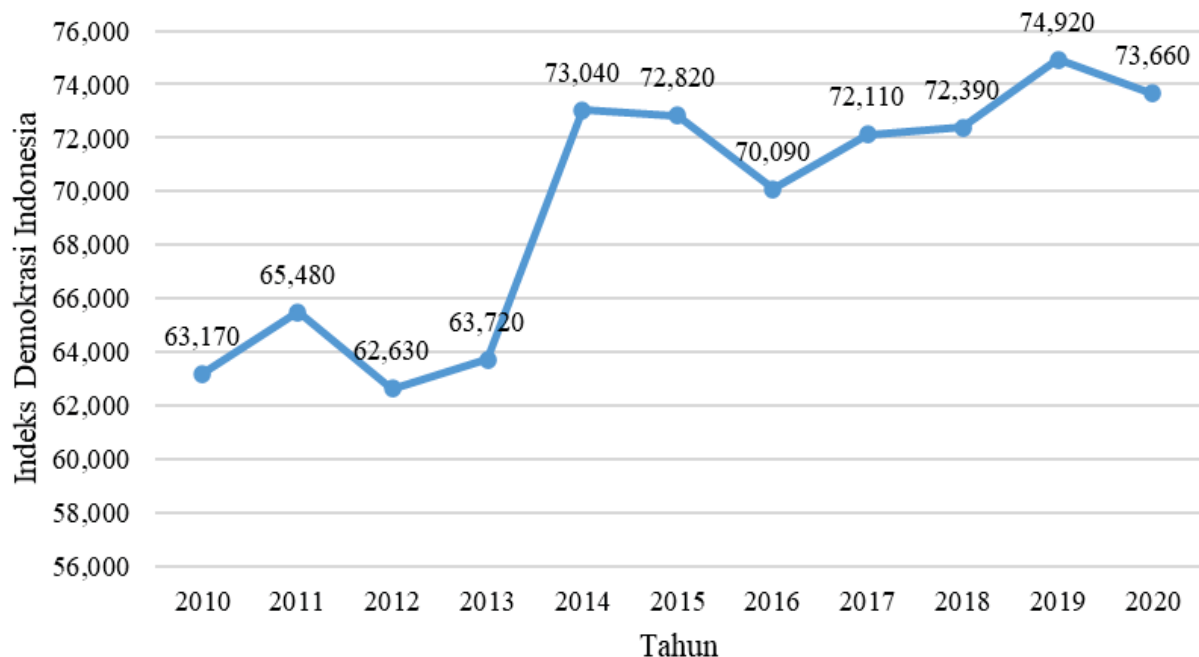
Gambar 1. 2 IPM Provinsi di Indonesia dan IPM Indonesia tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat IPM dari berbagai provinsi di Indonesia masih mengalami kesenjangan pada tiap provinsinya dan bahkan terdapat sebagian wilayah yang masuk dalam kategori IPM sedang dengan nilai 60-70. Secara umum IPM provinsi di wilayah bagian barat dan juga tengah berada pada sekitar nilai IPM Indonesia. Sementara itu, IPM provinsi di wilayah bagian timur masih ada yang jaraknya cukup jauh dengan IPM Indonesia contohnya seperti Provinsi Papua yang memiliki jarak sekitar 11,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat suatu kesenjangan terkait dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak yang terjadi di antara wilayah bagian barat dan juga wilayah bagian timur.

Selain itu, salah satu yang mampu mempengaruhi terjadinya kemiskinan menurut Sen (1981) adalah lemahnya akses terhadap demokrasi. Ketika proses

demokrasi tidak berjalan sebagai mestinya dalam lingkungan masyarakat maka kemiskinan tersebut juga akan meningkat. Demokrasi ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan artinya ketika proses pengambilan keputusan secara demokrasi mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian dimana demokrasi direpresentasikan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bahwa ketika terjadi peningkatan 1 poin Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) akan meningkatkan sebesar 0,1% penduduk miskin (Shabbir, 2011). Tingkat demokrasi di Indonesia sendiri tercermin melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hal tersebut dikarenakan menurut BPS (2013) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur paling objektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.



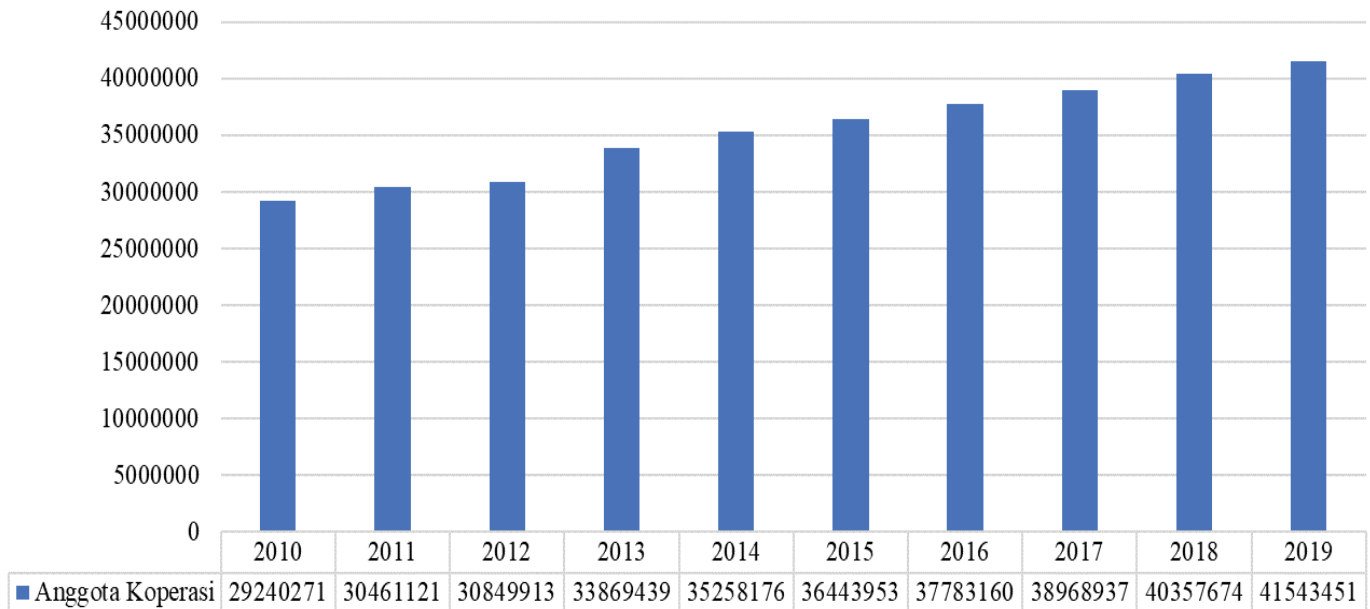
Gambar 1. 3 Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1.3 memperlihatkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mulai tahun 2010-2020 mengalami fluktuatif. Namun, secara nilai pada tahun 2014

menunjukkan peningkatan indeks yang sangat tinggi dibandingkan pada tahun 2013 dengan peningkatan sebesar 9,28. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 tersebut bertepatan dengan kontestasi pemilihan presiden dengan nilai 73,040 dan pada tahun 2019 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi nilai tertinggi yakni sebesar 74,920 dikarenakan juga bertepatan dengan kontestasi pemilihan presiden. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia dikategorikan sebagai demokrasi yang sedang karena berada diantara nilai 60-80.

Selain tingkat demokrasi, alternatif yang tepat agar terhindar dari kemiskinan yakni melalui peningkatan investasi dalam bentuk modal. Hal tersebut diperkuat oleh Samuelson & Nordhaus (2010) yang mengatakan bahwa permasalahan mengenai lingkaran kemiskinan dapat terjadi ketika masyarakat mengalami keterbatasan modal, ketidaksempurnaan pasar, dan perekonomian yang melambat. Menurut Kartasapoetra (2007) koperasi merupakan lembaga ekonomi dengan anggota yang tergabung secara sukarela dan berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Pernyataan tersebut juga diperkuat bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga kurang mampu adalah jangkauan terbaik dari koperasi (Buckland et al., 2005). Adanya lembaga ekonomi melalui koperasi tersebut dikatakan sebagai solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan keuangan dan juga permasalahan sosial ekonomi terutama pada rumah tangga dan masyarakat pedesaan yang memiliki pendidikan rendah serta kurang mampu dalam masalah ekonomi keluarga (Divya, 2014).



Gambar 1. 4 Jumlah anggota aktif koperasi di Indonesia tahun 2010-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah anggota yang tergabung menjadi bagian dari koperasi tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa koperasi masih menjadi salah satu lembaga ekonomi yang diminati masyarakat luas. Kenaikan jumlah anggota tersebut tentunya tidak lepas karena kemudahan dalam mengakses koperasi itu sendiri. Banyaknya koperasi tersebut juga tidak lepas dari keberagaman jenis koperasi itu sendiri. Berdasarkan (UU No. 12 Tahun 1967) koperasi menurut lapangan usahanya terbagi menjadi empat yakni koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi dan serba usaha. Keempat jenis koperasi tersebut memiliki fungsi dan peranannya sendiri dalam kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadikan koperasi sebagai alternatif dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Studi mengenai pengaruh determinan kemiskinan di Indonesia sangat menarik untuk dilakukan karena yang pertama, populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatannya sendiri sebesar 1,23%

namun, keadaan tersebut juga diimbangi dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tiap tahunnya di Indonesia. Kedua, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mengalami fluktuatif dalam periode 2010-2019 padahal dalam periode yang sama tingkat pendidikan, kesehatan dan jumlah unit koperasi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Ketiga sebagaimana yang dijelaskan oleh Todaro & Smith (2014) bahwa kemiskinan yang ada di negara berkembang sebagian besar terjadi akibat kurangnya kualitas yang dimiliki sumber daya manusia yang ada. Keempat seperti yang dijelaskan oleh Narayan (2006) bahwa tidak ada demokrasi di negara berkembang yang memiliki keberhasilan dalam menghilangkan kemiskinan. Adanya latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk bisa menganalisis pengaruh demokrasi, lembaga ekonomi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai determinan kemiskinan sudah pernah diteliti di berbagai negara terutama di Indonesia. Studi mengenai kemiskinan sebelumnya menggunakan variabel independen yang didalamnya meliputi pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk variabel independen yang menggunakan PDRB dan tingkat pengangguran terbuka juga pernah dilakukan dalam menganalisis tingkat kemiskinan Bintang & Woyanti (2018), Saputra (2011), Puspita (2015), Hidayat et al. (2020), Puspita (2015), Wirawan & Arka (2015) dan Wiguna (2013). Selain variabel independen tersebut Yolanda (2019) dan Harber (2002) juga pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel demokrasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di negara Asean dan Africa. Tidak hanya itu saja variabel lembaga ekonomi berupa koperasi juga pernah digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian untuk mengurangi kemiskinan Lal (2018), Yang & Hung (2014) dan Adnan & Ajija (2011).

Beberapa penelitian mengenai determinan kemiskinan di Indonesia pernah dilakukan dalam lingkup daerah yakni Provinsi Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Barat, Jambi, Jawa Timur Bintang & Woyanti (2018), Amaluddin et al. (2018), Hidayat

et al. (2020), Fahmi (2016) dan Azizah et al. (2018). Perbedaan yang terdapat pada penelitian kali ini yakni dengan menggabungkan semua variabel independen tersebut yakni pendidikan, kesehatan, demokrasi, lembaga ekonomi, PDRB, tingkat pengangguran terbuka dan juga penelitian ini mencoba membahas mengenai determinan kemiskinan yang lebih luas yakni sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas estimasi model yang sering digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu dengan regresi data panel.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian yakni menghitung dan menganalisis pengaruh dari variabel Indeks Demokrasi Indonesia, Lembaga Ekonomi, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010-2019 secara parsial dan simultan.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel (*times series* dan *cross section*). Model yang dirasa paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Model regresi yang terdiri dari enam variabel independen (demokrasi, lembaga ekonomi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka). Setelah itu dilakukan pengujian terkait uji asumsi klasik agar terhindar dari bias.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, lembaga ekonomi, PDRB berpengaruh negatif dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Disisi lain, variabel demokrasi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia tetapi hasil yang diberikan menunjukkan arah yang negatif. Namun, secara simultan semua variabel independen indeks demokrasi Indonesia, lembaga ekonomi,

rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.6 Kontribusi Riset

1. Berkontribusi secara akademis dalam menghitung dan menganalisis determinan kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2019.
2. Memberikan analisis faktor yang mempengaruhi tingkat penduduk miskin di Indonesia tahun 2010-2019 sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia pada masa sekarang atau masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Bab 1 (pendahuluan) menjelaskan mengenai gambaran latar belakang mengenai penelitian ini, kesenjangan dengan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, ringkasan metode yang digunakan, ringkasan hasil yang didapatkan, kontribusi yang diharapkan oleh penulis serta sistematika kepenulisannya. Bab 2 (tinjauan pustaka) menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian dan menguraikan beberapa hasil yang telah didapatkan dalam penelitian sebelumnya serta penentuan hipotesis penelitian. Bab 3 (metode penelitian) mendeskripsikan terkait pendekatan dan model yang digunakan serta mendeskripsikan terkait operasional variabel dan penentuan model empiris yang dipakai. Bab 4 (hasil dan pembahasan) menjelaskan mengenai gambaran umum variabel yang digunakan, deskripsi statistik, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 (penutup) menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian serta pemberian saran dan rekomendasi terhadap pemangku kebijakan.